**ANALISIS KESIAPAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM MENERAPKAN STANDAR AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL**

Oleh:

Dina Yuliana Darmawati

Akuntansi

Universitas Mercu Buana Yogyakarta

**INTISARI**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauah mana kesiapan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menerapkan standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan tipe pendekatan studi kasus deskriptif. Metode pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa staf bagian keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta sudah siap dalam penerapan SAP akrual, hal tersebut telah dibuktikan dengan para staf bagian keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah melakukan persiapan-persiapan yang diperlukan. Bentuk persiapannya yaitu dengan mengikuti bimbingan teknis (Bimtek) atau pelatihan dari Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) mengenai implementasi standar akuntansi pemerintah (SAP) berbasis akrual. Selain itu dari segi komitmen dan SDM sudah siap dalam menerapkan standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual. Dan dari segi teknologi informasi cukup siap karena hampir terintegrasi sepenuhnya dengan aplikasi SIPKD.

**Kata Kunci:** Kesiapan, Standar Akuntansi Pemerintahan, Basis Akrual.

1. **Pendahuluan**

Pemerintah Indonesia mencanangkan reformasi dibidang akuntansi pemerintahan. Hal ini dilakukan untuk terwujudnya *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintah. Reformasi tersebut adalah keharusan penerapan akuntansi berbasis akrual yang sejatinya sudah harus dilaksanakan sejak tahun 2008 yang akan diterapkan bagi pemerintah pusat, kementrian/lembaga, serta pemerintah daerah termasuk satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Hal ini mendorong Pemerintah pada tanggal 22 Oktober 2010, melalui Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) akhirnya menerbitkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menggantikan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2005. Pemerintah telah merencanakan untuk menggunakan basis akrual ini selambat-lambatnya pada tahun 2015. Hal tersebut ditegaskan dalam pasal 4 ayat (1) PP nomor 71 tahun 2010 disebutkan bahwa Pemerintah menerapkan SAP Berbasis Akrual. Begitu juga sesuai Pasal 32 UU No. 17 tahun 2003 yang mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan SAP.

Penerapan akuntansi berbasis akrual ini dalam pemerintahan merupakan tantangan baru. Salah satu instansi pemerintah yang terpengaruh atas perubahan sistem akuntansi menjadi akrual yakni Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta harus mempersiapkan diri seperti pelatihan yang diberikan kepada sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang nantinya akan menunjang dalam penerapan berbasis akrual. Persiapan yang dilakukan tersebut diberikan agar Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta lebih siap dan mampu mengatasi segala kendala yang akan muncul dalam penerapan basis akrual. Peneliti melakukan penelitian ini karena ingin mengetahui kesiapan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut: (1). Bagaimana kesiapan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual? (2). Bagaimana strategi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menerapkan Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual?

1. **Kajian Pustaka**
2. **Akuntansi Pemerintahan**

Akuntansi pemerintahan di Indonesia belum berperan sebagai alat untuk meningkatkan kinerja birokrasi pemerintahan dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Pada periode lama, *output* yang dihasilkan oleh akuntansi pemerintahan di Indonesia sering tidak akurat, terlambat, dan tidak informatif, sehingga tidak dapat diandalkan dalam pengambilan keputusan. Kekurangan yag ada dalam akuntansi pemerintahan pada periode tersebut sering menjadi ladang subur untuk tumbuhnya praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) (Simanjuntak dan Putri, 2013).

Akuntansi didefinisikan sebagai proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran, transaksi dan kejadian keuangan, penyajian pelaporan, serta penginterpretasian atas hasilnya (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 71 tahun 2010). Akuntansi pemerintahan adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga yang tidak bertujuan mencari laba (Baswir, 2000). Akuntansi pemerintahan mengkhususkan dalam pencatatan dan pelaporan transaksi yang terjadi di badan pemerintahan. Akuntan pemerintah menyediakan laporan akuntansi tentang aspek kepengurusan dari administrasi keuangan negara (Nordiawan, 2007).

1. **Standar Akuntansi Pemerintahan**

Standar Akuntansi Pemerintahan disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan yang independen dan ditetapkan dengan Peratutaran Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Hal tersebut dilakukan untuk memecahkan berbagai kebutuhan yang muncul dalam pelaporan keuangan akuntansi dan audit di pemerintahan baik pusat maupun pemda.

Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah (Peratutan Pemerintah Republik Indonesia nomor 24 tahun 2005 pasal 1 ayat 4). KSAP bertujuan mengembangkan program-program pengembangan akuntabilitas dan manajemen keuangan pemerintahan, termasuk dalam mengembangkan SAP dan mempromosikan penerapan standar tersebut. SAP disusun dengan mengadaptasi dari IPSAS (*international Public Sector Accounting Standart*) yang diterbitkan oleh IFAC (*international Federation Of Accountant*). Walaupun mengadaptasi dari IPSAS namun dalam penyusunannya disesuaikan dengan kondisi di Indonesia antara lain dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, praktik-praktik keuangan yang ada, serta kesiapan sumber daya para pengguna SAP. SAP diterapkan di lingkup pemerintahan, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah. Penerapan SAP diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintah pusat dan daerah.

1. **Basis Akuntansi**

Basis atau dasar akuntansi adalah hal terpenting dalam melakukan pencatatan. Basis akuntansi merupakan himpunan dari standar-standar akuntansi yang menetapkan kapan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lainnya tersebut diakui untuk tujuan pelaporan keuangan atau dasar akuntansi adalah hal terpenting dalam melakukan pencatatan. Basis akuntansi merupakan himpunan dari standar-standar akuntansi yang menetapkan kapan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lainnya tersebut diakui untuk tujuan pelaporan keuangan (Halim, 2012). Basis akuntansi menentukan asumsi yang akan dipakai dalam melakukan pencatatan dan pelaporan dan juga basis akuntansi yang akan dipilih akan mempengaruhi arsitektur standar akuntansi yang akan dibangun, baik kerangka konseptual maupun pernyataan yang terkait dengan kapan transaksi diakui dan berapa besar nilainya (Noerdiawan, 2007). Terdapat empat macam basis akuntansi dalam praktik akuntansi pemerintahan, antara lain:

1. Basis Kas ( *Cash Basis* )

Basis kas ini merupakan basis kas yang paling sederhana. Dalam basis ini transaksi ekonomi dan kejadian yang terjadi diakui ketika kas diterima atau dibayarkan. Basis kas ini dapat mengukur kinerja keuangan pemerintah yaitu untuk mengetahui penerimaan kas dan pengeluaran kas dalam suatu periode (Harun, 2009). Pengakuan basis kas ini hanya berdasarkan pada kas masuk dan kas keluar saja selain itu fokus pengukuran hanya pada kas, sehingga di neraca yang dilaporkan hanya akun kas dan ekuitas dana yang ada sisi pasiva hanya menggambarkan keadaan atas.

1. Basis Akrual ( *Accrual Basis* )

Teknik basis akrual memiliki fitur pencatatan dimana transaksi adalah dapat dicatat karena transaksi tersebut memiliki implikasi implikasi uang masuk atau keluar di masa depan. Transaksi dicatat pada saat terjadinya walaupun uang belum benar-benar diterima atau dikeluaran (Ritonga, 2006). Dengan kata lain basis akrual digunakan untuk pengukuran aset, kewajiban dan ekuitas dana. Jadi basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar (Ritonga, 2006).

1. Basis Kas Modifikasian (*Modified Cash Basis*)

Basis kas modifikasian ini transaksinya dicatat berdasarkan kas yang diterima atau dibayarkan, sehingga neraca yang dihasilkan akan seperti neraca berbasis kas. Pada dasarnya basis ini sama dengan akuntansi basis kas. Perbedaan basis kas ini berada pada fokus pengukurannya yang menggunakan sumber daya bukan hanya kas, sehingga posisi laporan keuangan dapat menggambarkan keadaan semua sumber daya yang ada (seperti utang dan piutang) tidak hanya kas (Nordiawan, 2007). Basis ini dalam laporan keuangan memerlukan pengungkapan tambahan atas pos-pos tertentu yang biasanya diakui dalam basis akrual. Pengungkapan ini tergantung dengan kebijakan pemerintah. Sebagai tambahan atas pos-pos yang diungkapkan dalam basis kas, ada beberapa pengungkapan yang terpisah atas saldo *near-cash* yang diperlihatkan dengan piutang yang akan diterima dan utang yang akan dibayar selama periode tertentu sebagai aset dan kewajiban keuangan (Harun, 2009)

1. Basis Akrual Modifikasian (*Modified Accrual Basis*)

Pada dasarnya basis akrual modifikasi ini adalah basis akrual yang mencatat transaksi sesuai dengan kejadiannya, tidak semata-mata pada saat kas diterima atau dibayarkan. Fokus pengukurannya hanya pada sumber daya yang bersifat lancar (Nordiawan, 2007).

1. **Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual**

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan telah menyusun Standar Akuntansi Pemerintahan dengan basis akrual yang merupakan langkah awal dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual dengan menetapkan Peraturan Pemerintah RI nomor 24 tahun 2005. Hal ini sejalan dengan amanat dalam UU No. 17 tahun 2003 pasal 36 (1) yang memberikan masa transisi selama lima tahun untuk penerapan pengakuan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual (Simanjuntak, 2005). Ketentuan undang-undang tersebut mewajibkan untuk segera menerapkan basis akrual dengan Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010 sebagai pedoman dalam pelaksanaanya.

Akuntansi berbasis akrual menurut Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010 adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa akuntansi berbasis akrual merupakan basis akuntansi yang melakukan pencatatan dan pengakuan pada saat terjadi transaksi tanpa memperhatikan adanya arus kas akibat transaksi.

Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010 pasal 1 ayat (8) menyatakan bahwa SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. Maksud dari definisi tersebut pengunaan basis akrual untuk mengakui transaksi yang berkaitan dengan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaksanaan anggaran menggunakan basis akuntansi yang ditetapkan dalam APBN/APBD.

Akuntansi berbasis akrual saat ini menjadi tren di berbagai negara. Penggunaan basis akrual mendapatkan salah satu ciri dari praktik manajemen keuangan modern (*sector public*) yang bertujuan untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai biaya pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan di dalam pemerintah dengan menggunakan informasi yang diperluas, tidak sekedar basis kas (Mulyana, 2009).

1. **Strategi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual**

Penerapan akuntansi akrual di pemerintahan merupakan tantangan besar dan penerapan ini di pemerintahan suatu negara tidaklah mudah. Perlu kehati-hatian dalam memilih strategi penerapan akuntansi akrual, karena basis akrual relatif lebih sederhana. Penerapan akrual basis terdapat dua model (widjajarso, 2008):

1. Model sekaligus (*big bang*)

Pilihan atas metode konversi harus dilakukan secara hati-hati sampai saat ini metode *big bang* sangat jarang digunakan (Ichsan, 2013). Model ini dilakukan dalam jangka waktu yang sangat singkat. Manfaat model ini mendukung terjadinya perubahan budaya organisasi, cepat mencapai tujuan, dan menghindari risiko kepentingan. Kelemahan juga dimiliki oleh model ini yakni beban kerja menjadi tinggi, tidak ada waktu untuk menyelesaikan masalah yang timbul, dan komitmen politik mungkin bisa berubah (Widjajarso, 2008).

1. Model bertahap

Model bertahap memiliki jangka waktu yang lebih panjang dibandingkan dengan model *big bang* sekitar empat sampai enam tahun (Mongoloi dalam Putri, 2013). Keuntungan model ini dapat diketahui permasalahan yang mungkin timbul dan dicarikan cara penyelesaiannya selama masa transisi untuk mengurangi resiko kegagalan. Namun, untuk dapat menerapkan model ini dibutuhkan sumber daya manusia yang banyak karena menerapkan dua basis secara bersamaan. Hal ini akan mempersulit perubahan budaya organisasi dan momentum penerapan basis akrual akan hilang (Widjajarso, 2008).

1. **Komponen Pendukung Kesuksesan dalam Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual**

Penerapan standar akuntansi pemerintahan basis akrual secara penuh ini membutuhkan komponen pendukung demi tercapainya keberhasilan atas penerapannya. Beberapa komponen pendukung keberhasilan penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dipaparkan dalam penjelasan berikut:

1. Komitmen dari pimpinan

Komitmen merupakan kunci keberhasilan dari suatu perubahan, karena mencakup loyalitas dan keterlibatannya dalam memberikan dukungan untuk tercapainya suatu tujuan. Komitmen organisasi adalah keadaan dimana seorang karyawan memihak pada suatu organisasi tersebut dan tujuannya, serta berniat untuk memelihara keanggotaannya dalam organisasi tersebut (Robbins dalam Putri, 2013). Jadi komitmen menggambarkan kondisi sejauh mana hubungan seorang pegawai dalam melibatkan dirinya pada organisasinya serta memiliki keinginan untuk tetap tinggal di organisasi itu. Penyebab kelemahan penyusunan laporan keuangan pada beberapa kementrian/lembaga adalah dari komitmen pimpinan satuan kerja khusus SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) sebagai penerima dana dekonsentrasi/tugas pembantuan. Oleh karena itu komitmen yang tinggi dari pimpinan juga diperlukan untuk membangun tata kelola dan sistem pengendalian internal organisasi yang baik.

1. Sumber Daya Manusia yang Kompeten

Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi. Kegagalan sumber daya manusia pemerintah daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidak sesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah. Pelaporan keuangan yang menuntut ketepatan waktu memerlukan tenaga yang mampu bekerja secara kompeten dan memiliki integritas yang baik. Hal ini yang menyebabkan perlunya SDM yang baik dan terlebih menguasai akuntansi pemerintahan (Yafie, 2012). Manusia merupakan unsur terpenting dalam memberikan kontribusi demi keberhasilan suatu organisasi. Sumber daya manusia adalah manusia yang mampu melakukan pekerjaan bagi suatu bisnis, dengan memberikan kontribusinya menggunakan kemampuan fisik mereka maupun menggunakan kemampuan mentalnya. Rekrutmen dan pelatihan sumber daya manusia diperlukan agar berkompeten dan profesional dalam pengelolaan keungan. Persiapan dalam sumber daya manusia adalah salah satu faktor utama dalam upaya penerapan SAP berbasis akrual.

1. Teknologi Informasi yang Memadai

Penerapan akuntansi berbasis akrual yang kompleks ini dapat dipastikan memerlukan teknologi informasi yang rumit dan membutuhkan waktu serta biaya yang tidak sedikit. Teknologi informasi merupakan istilah umum teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, dan mengkomunikasikan informasi (Haryanto dalam Putri, 2013). Teknologi informasi diperlukan untuk memproses dan mengolah berbagai informasi dalam penyusunan laporan keuangan agar sesuai dengan SAP, yaitu Sistem Informasi Keuangan Daerah. Menurut PP Nomor 24 Tahun 2005, Sistem Informasi Keuangan Daerah adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi pemerintah.

1. **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan di Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta yang beralamat di Jalan Lingkar Utara Maguwoharjo, Depok, Sleman. Metode yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian adalah metode kualitatif dengan tipe pendekatan studi kasus deskriptif yang menggambarkan suatu fenomena yang terjadi di kehidupan nyata.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moeleong, 2005).

1. **Desain Penelitian**

Studi kasus memerlukan desain penelitian dalam merencanakan dan melaksanakan penelitian dalam proses pengumpulan data. Desain penelitian merupakan susunan logis yang menghubungkan data yang telah dikumpulkan dengan pertanyaan awal penelitian (Yin, 2011). Tujuan pokok dari desain penelitian adalah membantu peneliti menghindari data yang tidak mengarah ke pertanyaan awal penelitian.



1. **Jenis dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari objek penelitian, diperoleh melalui wawancara baik terstruktur maupun tidak terstruktur. Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian, namun didapat dari buku-buku atau literatur yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Berikut uraian jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini:

* 1. Data Primer

Sumber data primer yang digunakan adalah data hasil wawancara yang terstruktur maupun tidak terstruktur dengan orang-orang yang terkait di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta.

* 1. Data Sekunder

Sumber data sekunder dapat menjadi pendukung untuk data primer. Seperti jurnal-jurnal penelitian yang dilakukan sebelumnya secara literatur yang melengkapi pokok pembahasan yang relevan baik media cetak maupun elektronik. Data sekunder ini dapat diperoleh peneliti dari dokumen, buku-buku atau literatur yang terdapat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta.

1. **Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data untuk kualitatif yang paling independen terhadap semua pengumpulan data dan teknik analisis data yaitu wawancara yang mendalam, observasi partisipasi, bahan dokumenter, serta metode bar seperti metode bahan visual dan penelusuran bahan internet (Bungin, 2008). Penelitian ini dilakukan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara yakni peneliti melakukan tanya jawab secara langsung dengan informan, baik struktur maupun tidak struktur. Wawancara secara mendalam merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang di wawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif sama (Bungin, 2008).

1. Observasi

Pengamatan atas kegiatan yang telah dilihat oleh peneliti selama kegiatan sedang berlangsung kemudian diuraikan dengan penjelasan-penjelasan yang ada. Observasi dilakukan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta.

1. Dokumentasi

Dokumentasi berkaitan dengan kegiatan pengumpulan dokumen-dokumen yang memiliki hubungan dan relevan dengan topik permasalahan. Sifat utama dari data ini tidak terbatas pada ruang dan waktu sehingga peneliti bisa mengetahui hal yang pernah terjadi di waktu silam (Bungin, 2008).

1. **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data menguraikan tentang strategi dan prosedur untuk menganalisis rumusan masalah yang telah dibuat. Analisis data terdiri atas pengujian, pengkategorian, pentabulasian, ataupun pengkombinasian kembali bukti-bukti untuk menunjuk proposisi awal suatu penelitian. Penggunaan pendekatan metode penelitian kualitatif ini suatu jawaban tidak dapat diukur dengan jumlah, akan tetapi indikatornya adalah makna dari konteks tersebut. Berikut langkah dalam menganalisis data dalam penelitian ini:

1. Menelaah keseluruhan data yang tersedia dari berbagai sumber yang didapat, yaitu berupa hasil wawancara langsung dengan informan, dokumen resmi dan dokumen pribadi.
2. Merangkum semua informasi dengan memilih data yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian.
3. Menganalisis dan mengevaluasi data lebih lanjut untuk menentukan dan memahami data yang diperoleh.
4. Memberikan interpretasi dan menarik kesimpulan agar dapat menjawab permasalahan penelitian.
5. **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**
6. **Kesiapan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual**

Praktik akuntansi pemerintah kini semakin berkembang, hal ini bertujuan agar mampu mewujudkan *good governance* dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan. Peningkatan dalam standar akuntansi di pemerintahan diperlukan demi tercipta suatu pelaporan keuangan yang akuntabel dan transparan sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Pemerintah terdorong menetapkan kebijakan dengan menerbitkan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Penggunaan standar akuntansi pemerintah ini secara penuh dilaksanakan pada tahun anggaran 2015. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan adanya SAP ini diharapkan nantinya mampu meningkatkan kinerja dalam menyajikan dan menyusun laporan keuangan yang akuntabel dan transparan.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian, menunjukan bahwa Dinas Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu SKPD yang diwajibkan menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual. Staf subbagian keuangan sendiri juga menilai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 lebih akurat dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Hal ini dipertegas dengan penuturan Ibu Sukartiningsih, SE selaku kepala subbagian keuangan sebagai berikut:

“Kalau akuratnya lebih akurat akrual karena kan dulu CTA hanya mengetahui jumlah uang yang keluar pada saat itu, tapi kalau basis akrual semenjak dokumen itu tercatat kita sudah bisa mencatatnya. Cuma lebih rumit akrual karena kita harus menyediakan 5 laporan keuangan, sebelumnya hanya ada 3 yaitu neraca, Laporan Reaslisasi Anggaran (LRA), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sekarang ada tambahannya yaitu Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Laporan Operasional (LO)”.

Oleh sebab itu, pegawai yang bekerja di subbagian keuangan atau akuntansi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta diharapkan mampu dan siap menghadapi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Pelaporan keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) telah sesuai dengan Undang-Undang yang ditetapkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Tri Suryani selaku staff subbagian keuangan mengenai pedoman yang mengatur pengelolaan keuangan dijelaskan bahwa:

“Sejak tahun 2015 pengelolaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta sudah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, kalau laporan tahun anggaran sebelumnya kita masih menggunakan basis CTA”.

Laporan Keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keuangan pemerintah daerah. Laporan keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun anggaran 2014 masih disusun dengan kebijakan akuntansi yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yakni Standar Akuntansi Pemerintahan yang berbasis *Cash Toward Accrual* sedangkan pada tahun anggaran 2015 sudah menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual.Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 komponen laporan keuangan yang disusun adalah neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Saat ditanyakan mengenai laporan keuangan apa saja yang disusun oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta Ibu Tri Suryani menjawab:

“kalau disini laporan yang dihasilkan ada 5 yaitu neraca, LRA, CaLK, LO, dan LPE. Mengapa kita tidak buat LAK dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih? yang menyusun LAK dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih pihak BLUD. Disnaker dan SKPD lain tidak membuat LAK dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih. Karena kami tidak mengelola pendapatan, maksudnya pendapatan yang kami terima semua disetor ke kas daerah tidak boleh kami gunakan langsung dalam operasi kegiatan.”

Laporan keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta yang disusun telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Namun karena Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta disebut sebagai entitas akuntansi hanya menyusun neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang disusun Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi pendapatan dan belanja. Wawancara yang dilakukan dengan Ibu Sukartiningsih, SE mengenai penyajian laporan keuangan LRA menjelaskan:

“LRAnya menyajikan pendapatan dan belanja. Pendapatannya merupakan Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari retribusi daerah lalu pendapatan lain-lain. Kalau belanja ada belanja tidak langsung itu untuk gaji, kalau belanja tidak langsung itu ada belanja pegawai, belanja barang dan jasa lalu belanja modal.”

Wawancara atas menyajikan LRA ini dipertegas dengan pengamatan yang dilakukan dengan melihat laporan keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun anggaran 2015. Pendapatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta bertumpu pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber PAD masih sangat didominasi oleh Pendapatan Retribusi Daerah. Pada belanja dibagi atas Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung adalah belanja pegawai sedangkan Belanja Langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Berdasarkan pengamatan dengan melihat laporan keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun anggaran 2015 LRA yang disusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran I.02 Pernyataan No.1 Paragraf 37.

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai aset, kewajiban , dan ekuitas dana. Berdasarkan pengamatan dengan melihat laporan keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun anggaran 2015 neraca yang disusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran I.02 Pernyataan No.1 Paragraf 49.

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta menguraikan latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum, sistematika penulisan CaLK juga menguraikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan, penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD, dan penjelasan atas informasi-informasi non keuangan.

Laporan Operasional (LO) adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Laporan Operasional Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta menyajikan pedapatan-LO dari kegiatan operasional, beban dari kegiatan operasional, dan surplus/defisit-LO.

Komponen laporan keuangan yang terakhir yang disusun oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir. Berdasarkan pengamatan dengan melihat laporan keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun anggaran 2014 Laporan Perubahan Ekuitas yang disusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran I.02 Pernyataan No.1 Paragraf 101 yang menyebutkan LPE sekurang-kurangnya berisi penjelasan tentang ekuitas awal, surplus/defisit-LO, dan ekuitas akhir.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengenai komponen laporan keuangannya berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Namun Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta selaku entitas akuntansi hanya menyusun Neraca, LRA, CaLK, LPE dan LO.

1. **Komponen Pendukung Kesuksesan dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual**

Setiap perubahan tentu membutuhkan komponen pendukung dalam penerapannya. Komponen pendukung dalam penerapan SAP berbasis akrual Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta antara lain:

1. **Komitmen**

Komitmen merupakan hal penting dalam melaksanakan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta pun menyadari, komitmen merupakan landasan kuat untuk mencapai keberhasilan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual. Dukungan dari pejabat berwenang sudah ada dan komitmen sepenuhnya dinilai sudah siap oleh staf subbagian keuangan misalnya:

1. Mempunyai komitmen sepenuhnya dengan baik dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual.
2. Mempunyai motivasi untuk mencapai hasil kerja yang baik dengan penerapan SAP berbasis akrual sebagai sarana mendukung optimasi kinerja pemerintah.

Simanjuntak (2010) juga menyatakan bahwa dukungan yang kuat dari pimpinan merupakan kunci keberhasilan dari suatu perubahan. Salah satu penyebab kelemahan penyusunan laporan keuangan pada beberapa kementrian/lembaga adalah lemahnya komitmen pimpinan satuan kerja khususnya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penerima dana dekonsentrasi/tugas pembantuan.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai komitmen dalam perubahan Standar Akuntansi Pemerintahan ini juga tidak diragukan lagi. Pelatihan sering diadakan untuk memberikan pemahaman kepada staf yang ada di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta. Ibu Sukartiningsih, SE menuturkan:

“Rapat iya sering dilakukan, terus disinikan yang menyusun laporan keuangannya ada petugas akuntansi, petugas akuntansi ini setiap tahun dia dikasih bimtek atau semacam pelatihan gitu lah”.

Penuturan Ibu Sukartiningsih, SE ini menunjukan bahwa komitmen dari pejabat yang berwenang maupun para staf dalam menghadapi perubahan ini siap karena sering diadakan rapat dan pelatihan membahas tentang pengenalan akrual.

1. **Sumber Daya Manusia yang Kompeten**

Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual merupakan produk kebijakan yang baru dan diperlukan kesiapan dari sumber daya manusia itu sendiri agar dapat mensukseskan penerapan ini. Sumber daya manusia sebagai pihak yang terlibat langsung dengan pekerjaan selalu mengutamakan untuk mencapai tujuan. Menghadapi penerapan standar akuntansi berbasis akrual ini dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan dan pengalaman yang memadai. Sesuai dengan pembagian tugas dan fungsi yang telah diatur sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakara Nomor 62 Tahun 2015 tentang rincian tugas dan fungsi, penempatan pegawai sudah sesuai dengan latar belakang pendidikan dan kemampuan hal ini akan mempermudah pegawai dalam menyelesaikan pekerjaannya. Hasil wawancara yang disampaikan oleh Ibu Sukartiningsih, SE menyatakan:

“Sudah ada pembagian tugas dan fungsi dengan jelas sesuai latar belakang pendidikan semua pegawai disini.”

Berdasarkan penelitian, jika dilihat dari segi latar belakang pendidikan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki sumber daya manusia dengan kemampuan atau kompetensi yang cukup siap untuk melaksanakan penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual serta memiliki kemauan untuk bekerja keras demi mendukung keberhasilan penerapan standar akuntansi pemerintahan ini. Kompetensi menunjukan keterampilan atau pengetahuan yang dicirikan oleh profesionalisme dalam suatu bidang tertentu sebagai sesuatu yang terpenting (Nawawi, 2013). Sebagian pegawai subbagian keuangan memiliki latar belakang pendidikan S1 di bidang akuntansi. Dari hasil wawancara dengan Ibu Sukartiningsih, SE selaku kepala subbagian keuangan menjelaskan bahwa:

“Ya cukup berkompeten, karena kan kalau disini harus punya semacam sertifikat keahlian dari pelatihan-pelatihan yang di adakan oleh pemda. Dan disini ada delapan orang termasuk saya, ada tujuh orang staf subbagian keuangan. Yang berpendidikan S1 sebanyak empat orang dan empat orang lagi SMEA.”

Pendidikan merupakan bentuk investasi bagi sumber daya manusia dengan melalui peningkatan keterampilan dan produktivitas kerja. Mereka semua diharapkan mampu dan siap dalam menghadapi perubahan, karena tingkat dan latar belakang pendidikan memiliki peranan penting bagi para pegawai dalam menjalankan tugas dan pekerjaan (Nawawi, 2013). Observasi dan wawancara yang dilakukan dengan informan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta sering mengadakan pelatihan terkait standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Ibu Sukartiningsih, SE mengungkapkan:

“Kita sering mendapatkan bimtek/pelatihan. Ada pendampingan dari DPPKA pada saat bimtek, jadi jika ada kendala-kendala kan bisa di konsultasikan ke situ.”

Pelatihan (training) merupakan proses pembelajaran yang melibatkan perolehan keahlian, konsep, peraturan, atau sikap untuk meningkatkan kinerja tenaga kerja (Simamora, 2006). Pelatihan atau diklat sangat dibutuhkan sebagai wadah pembinaan yang akan menghasilkan sumber daya manusia yang profesional dan berkompetensi (Nawawi, 2013). Pelatihan atau diklat yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta tidak hanya terpaku pada subbagian keuangan saja namun dari semua bagian yang terkait dihadirkan seperti bagian perlengkapan, bagian pengembangan sistem informasi dan bagian lainnya.

1. **Teknologi Informasi**

Faktor selanjutnya adalah sarana pendukung berupa teknologi infromasi berupa *hardware* dan *software* yang memadai dalam pelaksanaan SAP berbasis akrual. Aldiani (2010) berpendapat ketersediaan perangkat pendukung yang akan membantu SKPD dalam melaksanakan tugas seperti tersedianya komputer dan *software* yang berkaitan dengan kebutuhan dalam penerapan SAP. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta sudah memiliki Sistem Akuntansi Daerah yang disebut dengan SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah). Wawancara langsung yang dilakukan dengan Ibu Sukartiningsih, SE selaku kepala subbagian keuangan menyampaikan bahwa:

“Sudah ada lama mengenai program dalam pengelolaan keuangan namanya SIPKD atau kepanjangan dari Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah.”

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta pada penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengenai standar akuntansi pemerintah yang baru ini yaitu Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual memiliki *software* pendukung. Teknologi informasi merupakan istilah umum teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, dan mengkomunikasikan informasi. Pemanfaatan teknologi informasi akan sangat membantu mempercepat proses pengelolaan data transaksi dan penyajian laporan keuangan pemerintah sehingga laporan keuangan tersebut tidak kehilangan nilai informasi yaitu ketepat waktuan. Manfaat dan fungsi SIPKD sendiri bagi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya subbagian keuangan dinilai membantu para pegawai dalam memproses dan mengolah transaksi yang kemudian akan menjadi informasi dalam penyusunan laporan keuangan.

1. **Strategi dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual**

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dalam memenuhi ketentuan Permendagri No.64 Tahun 2013 pasal 10 ayat (2) tentang penerapan SAP berbasis akrual pada pemerintah daerah yang mengharuskan penerapan SAP berbasis akrual pada pemerintah daerah paling lambat mulai tahun anggaran 2015. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menghadapi standar akuntansi pemerintah yang berbasis akrual ini memakai model strategi penerapan dengan cara bertahap. Wawancara yang disampaikan oleh Ibu Sukartiningsih, SE mengenai strategi penerapan yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta menerangkan bahwa:

“Sosialisasi tentang akrual ini dari tahun 2013 tetapi untuk penerapannya di disnakertrans tahun 2015, kalau untuk pemda DIY SKPD yang lain itu sebelum 2015 sudah menerapkan akrual karena kan waktu itu hanya *sampel* 5 SKPD kalau gak salah.”

Dari hasil wawancara disebutkan bahwa strategi penerapan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta mengikuti ketentuan Permendagri No.64 Tahun 2013 pasal 10 ayat (2) tentang penerapan SAP berbasis akrual. Strategi penerapan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilihat pada tabel 4.1.

**Tabel 4.1 Strategi Penerapan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tahun** | **Strategi Penerapan SAP Akrual pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta** |
| 2010 | * Sosialisasi mengenai perubahan dalam penerapan SAP berbasis akrual.
 |
| 2013 | * Rapat mengenai SAP berbasis akrual.
* Pelatihan pengembangan SDM dari DPPKA.
 |
| 2014 | * Sosialisasi SAP berbasis akrual.
* Pengembangan sistem aplikasi SIPKD.
 |
| 2015 | * Implementasi penuh dan masih dalam taraf pembelajaran.
 |

Sumber: Data Olahan (2017)

Sosialisasi dilakukan terus menerus hingga tahun 2014 karena sudah tidak bisa mengelak lagi atas perubahan ini dan pada tahun 2015 standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual ini wajib diterapkan.

1. **Interpretasi**

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya subbagian keuangan merasa semangat dan mendukung atas perubahan standar akuntansi pemerintah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang berbasis akrual. Berdasarkan wawancara langsung dengan staf subbagian keuangan menyimpulkan perubahan ini akan membawa dampak yang baik karena lebih akurat. Laporan keuangan yang ada di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan SKPD sebagai entitas akuntansi menyusun antara lain Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta dilihat dari komitmen, siap dalam menghadapi perubahan penerapan ini. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya subbagian keuangan sangat berkomitmen mulai dari penjabat berwenang hingga para stafnya demi keberhasilan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual ini tidak maksimal jika tidak didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan Ardiansyah (2013) pemerintah pusat dan daerah perlu secara serius menyusun perencanaan dan penempatan sumber daya manusia di bidang akuntansi pemerintahan. Penilaian terhadap kesiapan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan sumber daya manusia dinilai siap. Staf subbagian keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta mengerti akan akrual, walaupun para staf di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya subbagian keuangan masih dianggap akrual ini rumit. Untuk menciptakan sumber daya yang kompeten Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan upaya:

1. Mengadakan sosialisasi mengenai perubahan dalam penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.
2. Mengadakan bimtek atau pelatihan dari DPPKA bagi para staf bagian keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kesiapan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah berbasis akrual cukup siap bila ditinjau dari teknologi informasi. Aplikasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta dirasa sudah cukup memadai.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah berbasis akrual di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta telah siap dari segi komitmen dan sumber daya manusia. Dari segi teknologi informasi cukup siap karena hampir terintegrasi sepenuhnya dengan aplikasi SIPKD. Model strategi penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan secara bertahap antara lain sosialisasi yang dilakukan terus menerus guna mengembangkan sumber daya manusia yang kompeten dan pengembangan sistem yang berkelanjutan.

1. **PENUTUP**

Berdasarkan pada hasil analisis yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut, Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta telah siap dari segi komitmen dan sumber daya manusia. Dari segi teknologi informasi cukup siap karena hampir terintegrasi sepenuhnya dengan aplikasi SIPKD. Model strategi penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan secara bertahap antara lain sosialisasi dan pelatihan atau bimtek yang dilakukan terus menerus guna mengembangkan sumber daya manusia yang kompeten dan pengembangan sistem yang berkelanjutan.

Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian ini terdapat keterbatasan-keterbatasan, adapun keterbatasan penelitian ini antara lain, Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal interpretasi terhadap data-data yang diperoleh. Sehingga penelitian ini masih perlu didukung oleh penelitian-penelitian sejenis. Keterbatasan lainnya adalah jumlah responden yang kurang banyak. Kurang banyaknya jumlah responden yang diperoleh dalam penelitian ini tentu mengurangi derajat keterwakilan bagi pegawai lain yang tidak menjadi responden.

Pada penelitian ini masih dibutuhkan beberapa perbaikan untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Adapun beberapa saran dari peneliti yaitu, Penambahan beberapa responden dalam menganalisis kesiapan pemerintah daerah dalam menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Sehingga, nantinya diperoleh kembali berbagai macam sudut pandang mengenai topik penelitian ini. Khusus untuk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta harus lebih sering lagi melakukan sosialisasi berupa seminar atau diskusi dengan aparat pemerintah, serta dilakukan training atau pelatihan – pelatihan yang berkaitan dengan standar akuntansi berbasis akrual.

**DAFTAR PUSTAKA**

Ardiansyah. 2013. Factor affecting teh Readines of PP no. 71 Tahun 2010 about Government Accounting Standards (Case Study on working Units in KPPN Malang’s Working Area). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis*, Vol. 1 No. 1.

Baswir, Revrisond. 2000. *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: BPPE-Yogyakarta.

Bungin, Burhan. 2008. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Edisi Pertama. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Faradillah, Andi. 2013. Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (peratutan pemerintah nomor 71 tahun 2010). *Skripsi*. Makasar: Universitas Hasanudin.

Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. 2012. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Empat. Jakarta: Salemba Empat.

Herlina, Hetti. 2013. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesiapan Pemerintahan Daerah dalam Implementasi PP 71 Tahun 2010 (Studi Empiris: Kabupaten Nias Selatan). *E-Journal of UNP\_Universitas Negeri Padang Indonesia,* Vol. 1 No. 3: Seri F.

Komite Standar Akutansi Pemerintahan. 2012. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.

Madura, Jeff. 2007. *Pengantar Bisnis*. Edisi Keempat. Jakarta: Salemba Empat.

Mahmudi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UH Press.

Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Mulyana, Budi. 2009. *Penggunaan Akuntansi Akrual di Negara-Negara Lain: Tren di Negara-Negara Anggota OECD*. (<http://sutaryofe.staff.uns.acc.id> diakses 26 Oktober 2016).

Putri, Fenti Nano. 2013. Analisis Kesiapan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Berbasis Akrual. *Skripsi*. Surabaya: Universitas Airlangga.

Rasyid, Kamal Dwi. 2014. Analisis Perbedaan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Cash Toward Accrual (PP No. 24/2005) dengan SAP Berbasis Accrual (PP No. 71 Tahun 2010) (Studi Kasus di Pemerintah Kota Batu). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, Vol. 2 No. 2.

Ritonga, Rahmansyah. 2006. Kas Basis Vs Akrual Basis. Widyaiswara BDK. Medan. Jurnal Kemenag. (Online). (<http://sumut.kemenag.go.id/> diakses 26 Oktober 2016).

Simanjuntak, Binsar H. 2005. Menyongsong Era Baru Akuntansi Pemerintahan di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, Vol. 1 No. 1.

Widjajarso, Bambang. 2008. *Penerapan Basis Akrual Pada Akuntansi Pemerintah Indonesia: Sebuah Kajian Pendahuluan*. Jakarta: badan pendidikan dan pelatihan keuangan-kementrian keuangan RI (<http://sutaryofe.staff-uns.ac.id/> diakses tanggal 28 Oktober 2016).

Yafie, M. Dhairolly. 2012. Penerapan Basis Akrual Pada Standar Akuntansi Pemerintahan Indonesia. *Jurnal Online Universitas Negeri Surabaya*, Vol. 2 No. 1.

Yin K. Robert, Prof. 2011. *Studi Kasus: Desain dan Metode*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.